

Peran dan Strategi TNI AL dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) Melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

Baiq Nindy Anidia Agustina

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, 83125

baiqnindyanidia@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the role and strategy of the Indonesian Navy in securing the Indonesian Archipelagic Sea Lanes II (ALKI II) through Military Operations Other Than War (OMSP). The role and strategy of the Indonesian Navy is important considering the many threats and violations that occurred at ALKI II in the form of traditional or non-traditional threats. Data analysis in this study uses sea power theory and is supported by two concepts, namely the concept of maritime security and the concept of strategy. This research uses a descriptive research type with a qualitative approach, the data in this study comes from primary data obtained from interviews and secondary data from books, journals, news, and various literature that are considered credible and relevant to the research topic. The results of the study found that the roles and strategies of the Indonesian Navy were designed through three aspects, namely objectives, methods and resources used. The goal of securing ALKI II is to maintain and protect state sovereignty, this goal is achieved through various operations based on strategic environmental conditions, while operations can run supported by existing resources in the form of sea power owned and improvements in various aspects to achieve the idea of world class navy. The role and strategy carried out by the Indonesian Navy is quite efficient in maintaining maritime security because the level of threats that occur in ALKI II is starting to decrease.

Keywords: *Indonesian Navy, Indonesian Archipelagic Sea Lanes II, Military Operations Other Than War, World Class Navy*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peran dan strategi TNI AL dalam mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) dengan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Peran dan strategi TNI AL menjadi penting mengingat banyaknya ancaman dan pelanggaran yang terjadi di ALKI II berupa ancaman tradisional ataupun non tradisional. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *sea power theory* serta didukung oleh dua konsep yakni konsep keamanan maritim dan konsep strategi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dan data sekunder dari buku, jurnal, berita, serta berbagai literatur yang dianggap kredibel dan relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa peran dan strategi TNI AL dirancang melalui tiga aspek berupa tujuan, cara dan sumber daya yang digunakan. Tujuan pengamanan ALKI II yakni untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, tujuan ini dicapai melalui berbagai operasi berdasarkan pada kondisi lingkungan strategis, adapun operasi dapat berjalan dengan didukung oleh sumber daya yang ada berupa *sea power* yang dimiliki dan peningkatan dalam berbagai aspek untuk mencapai gagasan *world class navy*. Peran dan strategi yang dijalankan TNI AL tersebut cukup efisien dalam menjaga keamanan maritim karena tingkat ancaman yang terjadi di ALKI II mulai berkurang.

Kata Kunci: TNI AL, ALKI II, OMSP, *World Class Navy*

PENDAHULUAN

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 11 Nomor 37 Tahun 2002, Indonesia memiliki 3 alur laut kepulauan dari utara ke selatan yang terdiri dari ALKI I,

ALKI II, dan ALKI III. (Pemerintah Pusat, 2002) Karena posisi dan keunggulan Indonesia dalam urusan geopolitik dan geostrategis, ALKI rentan terhadap berbagai bahaya. (Listiyono, Prakoso, & Sianturi, 2019) Setiap tahunnya sebanyak 53.068 unit kapal dengan berbagai jenis dan ukuran melewati ALKI I, 36.773 unit kapal dengan berbagai jenis dan ukuran melewati ALKI II, (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 2019) dan 12.120 unit kapal yang melintasi ALKI III. (Noviani, 2023) Intensitas pelayaran yang padat di ALKI I menjadikan efektivitas dan nilai ekonomis menurun, ditambah dengan pendangkalan yang terjadi di ALKI I, sehingga kapal-kapal besar memindahkan trayek pelayarannya ke ALKI II karena merupakan jalur laut dalam yang memiliki nilai ekonomis dan aman sebagai jalur perdagangan dan pelayaran internasional, sehingga ALKI II sebagai jalur pendukung utama dari ALKI I semakin padat. (Susdarwono, 2020)

Hal ini menjadikan ALKI II memiliki potensi ancaman yang semakin tinggi, potensi ancaman yang muncul dapat berupa ancaman tradisional maupun ancaman non tradisional. Ancaman tradisional biasanya berupa ancaman terhadap kedaulatan negara dalam bentuk pelanggaran terhadap hak lintas ALKI yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2002. Pelanggaran terhadap hak lintas ALKI dilakukan oleh AS berupa *freedom of navigation* di wilayah udara Indonesia diluar ALKI. (Bunga, 2017) Ancaman lain juga berasal dari Malaysia yang melakukan pelanggaran batas wilayah kedaulatan Indonesia di Nunukan sebanyak 2 kali di tahun 2020. (Kharish, Syahtaria, Sianturi, Prakoso, Saragih, & Bangun, 2022) Selain itu, spionase juga termasuk ancaman tradisional yang banyak terjadi di ALKI II, dalam kasusnya terjadi pada 26 Desember 2020 berupa penemuan *SeaGlider* buatan China yang merupakan *drone* bawah laut di Kepulauan Selayar. Pada 18 Februari 2022 kembali ditemukan *SeaGlider* buatan USA di wilayah yang berdekatan dengan lokasi sebelumnya di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. (Cipto, Polisi Selidiki Seaglider yang Ditemukan Nelayan di Kepulauan Selayar, 2022)

Ancaman keamanan non tradisional menjadi ancaman di ALKI II, ancaman non tradisional dapat berupa *transnational organized crime*, dalam hal ini penyeludupan senjata, narkoba, dan manusia. Berdasarkan data dari *Indonesia Maritime Information Center*, kasus penyeludupan narkoba melalui perairan Indonesia dalam rentang waktu 2021-2022 berjumlah 77 kasus, (Indonesia Coast Guard, 2023) Selain itu, mengacu pada kasus *human trafficking*, berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, terdapat sebanyak 683 kasus *human trafficking* dalam rentang waktu 2021-2022. (Simfoni PPA, 2022) Sedangkan untuk kasus penyeludupan senjata di ALKI II dalam beberapa kasus, senjata diseludupkan dari Filipina untuk teroris di Poso dan untuk KKB di Papua. (Adhi, 2023) Kaitannya dengan aksi terorisme yang terjadi di Poso, perairan antara perbatasan Indonesia dengan Filipina Selatan menjadi wilayah yang dianggap rawan terhadap persebaran pelaku terorisme global, hal ini semakin nyata dengan masuknya senjata dan amunisi yang diperoleh dari kelompok ekstrim di Filipina Selatan ke Poso. (Kharish, Syahtaria, Sianturi, Prakoso, Saragih, & Bangun, 2022)

Kemudian ancaman terhadap ALKI II jika ditinjau dari aktivitas *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing* yang cukup tinggi, berdasarkan pada data dari *Indonesia Maritime Information Centre* pada tahun 2021-2022 tercatat 121 kasus IUU *fishing* yang terjadi di perairan Indonesia yang dilaporkan kepada institusi pengelola perikanan yang berwenang. (Indonesia Coast Guard, 2023) Ancaman non tradisional juga mencakup isu lingkungan,

ancaman datang dari kapal-kapal yang melakukan pencemaran di laut dengan membuang *ballast water*, (Alamsyah, Ariadno, Arsegianto, & Simanjuntak, 2022) hal ini menjadi berbahaya karena terdapat berbagai jenis spesies yang hidup didalam *ballast water* tersebut yang mampu membahayakan kehidupan lingkungan laut dan mengubah ekosistem di laut. (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 2015) Disisi lain, kapal tongkang batu bara yang kerap melintasi jalur ALKI II juga menjadi ancaman, karena limbah batu bara yang jatuh ke perairan akan berdampak buruk bagi biota laut yang merupakan sumber pangan sehingga berbahaya jika dikonsumsi. (Alamsyah, Ariadno, Arsegianto, & Simanjuntak, 2022) Selain itu, ancaman kecelakaan laut juga menjadi ancaman yang serius di ALKI II, berdasarkan data dari *Indonesia Maritime Information Centre*, kasus kecelakaan laut dalam rentang waktu 2021-2022 sebanyak 1.562 kasus, (Indonesia Coast Guard, 2023) hal ini menandakan bahwa permasalahan jalur pelayaran masih perlu dibenahi khususnya di ALKI II, dimana padatnya pelayaran internasional dari utara ke selatan atau sebaliknya oleh kapal internasional ditambah dengan pelayaran domestik dari pelabuhan Lembar ke pelabuhan Padang Bai menjadikan jalur pelayaran yang cukup padat dan rawan akan terjadinya kecelakaan laut.

Ancaman-ancaman tersebut menjadi sebuah tantangan bagi TNI AL sebagai penegak hukum di laut yang dituntut untuk mampu memberikan jaminan keamanan bagi kapal-kapal asing yang melintas di wilayah ALKI. Maka dari itu, pola operasi yang diterapkan oleh TNI AL menjadi tonggak utama bagi keamanan di jalur ALKI II. Adapun pola operasi TNI tidak hanya pada operasi militer perang saja, namun mencakup operasi militer selain perang yang dapat digunakan untuk memerangi ancaman di wilayah perairan Indonesia khususnya jalur ALKI II. (Kharish, Syahtaria, Sianturi, Prakoso, Saragih, & Bangun, 2022) Pada praktiknya, Komando Armada II dengan wilayah kerjanya meliputi ALKI II telah menyelenggarakan operasi militer selain perang yang berupa operasi laut sehari-hari maupun operasi keamanan laut di wilayah kerja yang telah ditentukan, (Koarmada II, 2018) serta beberapa kerjasama dengan dengan negara lain, hal ini dianggap cukup efisien dalam menjaga keamanan maritim dapat dilihat dari menurunnya angka pembajakan di Laut Sulu. (Dirgantara, Eko W., & Suharto, 2020)

Namun peningkatan dalam satu aspek saja tidak menjadikan wilayah perairan Indonesia menjadi aman, masih banyak ancaman dan pelanggaran yang terjadi di ALKI II meskipun penggelaran operasi seperti patroli oleh Koarmada II dilakukan secara rutin, namun bukan berarti hasil yang diperoleh tidak ada kekurangan. (Dirgantara, Eko W., & Suharto, 2020) Maka dari itu menjadi perlu untuk ditelaah lebih jauh mengenai strategi dan pola operasi yang diterapkan oleh TNI AL dalam pengamanan wilayah ALKI II dari berbagai ancaman dan pelanggaran yang terjadi, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan strategi TNI AL dalam pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia II melalui operasi militer selain perang.

TINJAUAN PUSTAKA

Ancaman keamanan di ALKI II dalam penelitian ini dikaji menggunakan beberapa literatur terdahulu. Penulis menggunakan penelitian dari Amora Harris, Lukman Yudho Prakoso dan Dohar Sianturi yang berjudul "Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia II" dalam Jurnal Strategi Pertahanan Laut Volume 5 Nomor 1 Tahun 2019. (Harris, Prakoso, & Sianturi, 2019) Literatur ini menjelaskan terkait kondisi dan stabilitas keamanan di sekitar ALKI II serta ancaman keamanan yang muncul di

sekitar ALKI II itu sendiri sebagai akibat dari perkembangan dinamis lingkungan strategis yang terjadi. Harris dkk lebih banyak menonjolkan terkait dengan ancaman keamanan yang terjadi di ALKI II. Adapun beberapa pembahasan yang menarik dari penelitian ini adalah penulis banyak menjelaskan terkait dengan gagasan poros maritim dunia di era pemerintahan Joko Widodo, dimana ancaman yang terjadi dapat mempengaruhi perwujudan agenda PMD itu sendiri, sehingga penelitian ini tidak hanya berfokus pada ancaman keamanan saja namun juga membahas terkait dengan pencapaian kinerja pemerintah saat ini. Penelitian ini menemukan bahwa kondisi keamanan di sekitar ALKI II dapat dikatakan tidak stabil, hal ini ditandai dengan perkembangan dinamis dan peningkatan ancaman instabilitas kawasan.

Adapun mengenai strategi TNI AL dalam pengamanan ALKI II dibahas dalam jurnal berjudul “Strategi Gelar Kekuatan TNI Angkatan Laut dalam Mengatasi Pelanggaran di Wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia II Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Perairan dalam Rangka Mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP)” Jurnal Inovasi Penelitian Volume 2 Nomor 8 Tahun 2022 yang ditulis oleh Lukman Kharish, dkk. (Kharish, Syahtaria, Sianturi, Prakoso, Saragih, & Bangun, 2022) Penelitian ini menganalisa mengenai bentuk interoperabilitas antar matra TNI di wilayah ALKI II dalam mendukung kedaulatan NKRI serta upaya dalam penguatan strategi pola operasi dan penggelaran kekuatan TNI AL di wilayah ALKI II. Kharish dkk lebih menonjolkan pembahasannya pada strategi gelar kekuatan TNI AL, dalam hal ini merupakan penjabaran terkait dengan langkah-langkah yang diambil oleh TNI AL dalam melaksanakan pelatihan sebagai persiapan untuk mengatasi ancaman yang ada di ALKI II, serta menekankan pada hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan dalam upaya menjaga keamanan wilayah ALKI II seperti peningkatan alutsista serta mengoptimalkan patroli keamanan laut. Adapun dalam penelitiannya, Kharish dkk menemukan bahwa interoperabilitas antar matra TNI di wilayah ALKI II belum terintegrasi secara keseluruhan dan masih berjalan secara terpisah, upaya dalam strategi pola operasi dan pengerahan kekuatan tempur TNI di wilayah ALKI II belum ideal dan masih bersifat sentralistik dan kedaerahan. Kharish dkk dalam penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi pola kemampuan TNI AL dalam kontrol terhadap wilayah laut melalui 2 cara yakni integrasi seluruh matra dengan lembaga yang memiliki kewenangan di laut dan optimalisasi patroli keamanan laut hingga pulau terluar di wilayah ALKI II.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan teknik analisis data kualitatif yang dimana permasalahan dalam penelitian ini mengamati perilaku kelompok, dalam konteks ini peneliti mengkaji bagaimana strategi yang diambil oleh lembaga penegak hukum dan penjaga keamanan di laut yakni TNI AL dalam mengamankan jalur pelayaran internasional, dimana tindakan tersebut dapat mempengaruhi wilayah ALKI itu sendiri dan masyarakat internasional yang menggunakan hak lintas alur laut kepulauan di Indonesia. Jenis penelitian ini lebih bersifat deskriptif dalam proses pengumpulan datanya dan tidak terlalu menekankan angka karena berupa kata-kata atau gambar. (Prof. Dr. Sugiyono, 2013)

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara untuk mendapatkan data primer dan studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder, wawancara dilakukan dengan jenis wawancara terarah (*guided interview*) dimana peneliti menyiapkan hal-

hal yang ingin ditanyakan, kemudian peneliti memberikan pertanyaan tersebut kepada informan, namun jika terdapat jawaban yang kurang memuaskan, peneliti dapat mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik tanpa berpaku pada pertanyaan yang telah disiapkan, wawancara dilakukan di Markas Komando TNI Angkatan Laut Mataram. (Rahardjo, 2011) Sedangkan, pengumpulan data melalui studi pustaka diperoleh dari buku, jurnal penelitian, berita ataupun situs internet yang dianggap kredibel dan selaras dengan topik yang diangkat. Data-data tersebut diolah dan dianalisis dengan 5 tahapan berupa pengumpulan, reduksi data, penyajian data, verifikasi ulang dan penarikan kesimpulan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Dari banyaknya ancaman yang terjadi di ALKI II, maka dalam mengamankan ALKI II harus didukung oleh kekuatan laut atau kekuatan angkatan laut Indonesia, oleh karena itu penelitian ini menggunakan *sea power theory* sebagai pisau analisisnya. Selain itu penelitian ini juga menggunakan konsep keamanan maritim untuk memberikan gambaran wilayah laut yang aman, serta konsep strategi untuk menganalisis perancangan strategi TNI AL dalam mengamankan ALKI II dengan melalui OMSP.

SEA POWER THEORY

Sea power kerap dimengerti sebagai suatu konsep yang dimaksudkan untuk menunjukkan posisi kekuatan angkatan laut dan strategi angkatan laut dalam mengurai ancaman. (Yuliarta & Rahmat, 2021) Mahan telah menetapkan beberapa kebutuhan yang dijabarkan dalam bukunya "*The Influence of Sea Power on History*" yakni negara yang memiliki posisi strategis, memiliki perbatasan yang aman, dan memiliki akses ke satu atau lebih laut lepas. (Alipour, 2021) Melalui analisis kekuatan angkatan laut, Mahan menyimpulkan bahwa negara perlu memiliki enam elemen yang dapat mempengaruhi *sea power*. (Prasetyo, Prakoso, & Sianturi, 2019)

Enam elemen *sea power* diantaranya letak geografis (*geographical position*) yang mengacu pada posisi geografis suatu negara yang menjadi penentu bagi kejayaannya, karena posisi geografis dapat memberikan keuntungan strategis jika negara tersebut mampu memainkan perannya., (Fitriyanti, 2020) Sifat fisik (*physical conformation*), beberapa unsur penting dalam elemen ini menurut Mahan diantaranya, garis pantai sebagai tempat pembangunan pelabuhan dalam (*deep harbor*) bagi kapal dagang, keamanan pelayaran, serta pengawasan segala aspek wilayah negara. (Anwar, 2018) Luas wilayah suatu negara (*exatent of territory*), yang berkaitan dengan panjang garis pantai suatu negara dengan tingkat kesulitan dalam mempertahankan wilayah negaranya pada masa perang. (Fitriyanti, 2020) Sehingga wilayah-wilayah terluar yang merupakan wilayah yang dianggap rentan menjadi penting untuk diperhatikan. Jumlah penduduk suatu negara (*number of population*), Mahan menekankan bahwa jumlah penduduk menjadi penting karena menentukan jumlah individu yang siap untuk mengawaki kapal perang, kapal dagang, menjadi awak di industri maritim ataupun sektor ekonomi lainnya, serta sebagai cadangan angkatan laut. Karakter bangsa (*character of the people*) menjadi penting karena karakter kelautan yang kuat menjadi pondasi yang kuat untuk membangun kekuatan laut, baik melalui perdagangan maupun perkembangan kekuatan angkatan laut. Karakter pemerintahan (*character of government*) menjadi penting karena

kebijakan pemerintah akan mempengaruhi perkembangan kekuatan laut suatu negara. (Anwar, 2018)

Berdasarkan pada elemen-elemen *sea power* oleh Mahan tersebut yang dapat dijadikan acuan dalam melihat *sea power* suatu negara, jika dijabarkan dalam realitas serta progres yang dicapai Indonesia dapat digambarkan berdasarkan posisi geografis (*geographical position*), posisi ALKI II yang dapat menghubungkan ke laut lepas yakni Samudera Hindia, maka potensi ini dimanfaatkan oleh pemerintah Kalimantan Timur yang dekat dengan ALKI II disepanjang pesisir timurnya membangun pelabuhan baik untuk skala nasional maupun internasional. (Humas Prov. Kaltim, 2013) Sifat fisik (*physical conformation*), dimana Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dan tiga ALKI menjadi kontur jalur laut dalam bidang perdagangan dan komunikasi, (Yakti, 2017) sehingga hal ini dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi dengan membangun 24 pelabuhan dengan 5 diantaranya pelabuhan laut dalam (*deep sea port*) yang dapat disandari oleh kapal-kapal besar, yang dibangun di beberapa wilayah dan dua diantaranya dekat dengan ALKI II yakni Tanjung Perak di Surabaya dan Makassar di Sulawesi Selatan. (Deny, 2014) Luas wilayah suatu negara (*extent of territory*), dalam progresnya poin ini lebih menekankan pada bagaimana TNI mempertahankan pulau-pulau terluar Indonesia melalui penempatan personel TNI yang efektif. (Yakti, 2017) Hal ini dapat dilihat dari kerjasama antara militer Indonesia dengan Filipina dalam memperketat pengawasan pada jalur masuk di pulau-pulau kecil di perbatasan kedua negara dengan melalui OMSP.

Jumlah penduduk suatu negara (*number of population*), penduduk umur produktif kerja Indonesia mencapai 69,3% pada 2022, (Kusnandar, 2022) maka dengan jumlah penduduk Indonesia akan menentukan seberapa banyak tenaga pelaut yang disiapkan serta masyarakat sipil yang berperan dalam *sea health* yang akan berpengaruh pada lingkungan bawah laut. Dua elemen terakhir yakni karakter bangsa (*character of the people*) dengan karakter pemerintahan (*character of government*) saling berkaitan karena kebijakan pemerintah akan mempengaruhi karakter bangsa itu sendiri, dengan visi pemerintah saat ini yang menyatakan untuk tidak memungungi samudra, laut, selat dan teluk menyadarkan masyarakat bahwa laut memiliki peluang dan manfaat yang besar, sehingga potensi laut dapat dimaksimalkan. (Yakti, 2017)

KONSEP KEAMANAN MARITIM

Christian Bueger menjelaskan bahwa keamanan maritim mengacu pada ancaman yang ada di domain maritim, seperti sengketa maritim antar negara, terorisme maritim, pembajakan, perdagangan narkoba, barang ilegal ataupun manusia, *illegal fishing*, kejahatan lingkungan serta kecelakaan dan bencana maritim, maka keamanan maritim dapat dilihat dari keadaan dimana tidak adanya ancaman-ancaman tersebut. (Bueger, 2015) Bueger kemudian mengidentifikasi beberapa konsep keamanan dalam keamanan maritim, terdapat tiga konsep keamanan yang dianggap relevan untuk dapat menggambarkan keamanan di wilayah ALKI II berdasarkan pada ancaman-ancaman di wilayah tersebut.

Konsep keamanan tersebut mencakup kekuatan laut atau kekuatan angkatan laut (*sea power*) yang menjelaskan bahwa angkatan laut adalah salah satu faktor utama dalam keamanan maritim yang berkaitan dengan seberapa jauh pasukan negara harus bertindak diluar perairan teritorial mereka dan di perairan internasional. (Wiranto, 2020) Keselamatan laut (*marine safety*) membahas keselamatan kapal dan instalasi maritim yang mencakup pelabuhan dan berbagai kebutuhan navigasi lainnya, dengan tujuan untuk melindungi profesional maritim

dan lingkungan laut. (Bueger, 2015) Keamanan manusia (*human security*) yang memusatkan pertimbangan keamanan pada kebutuhan rakyat daripada negara, dimensi inti dari keamanan manusia mencakup makanan, tempat tinggal, mata pencaharian yang berkelanjutan dan pekerjaan yang aman, bidang perikanan merupakan sumber pangan dan lapangan kerja yang vital terutama dinegara kepulauan, IUU *fishing* merupakan masalah besar yang berdampak pada keamanan manusia. (Bueger, 2015)

Christopher Rahman juga mengusulkan beberapa pendekatan dalam melihat keamanan maritim yang sejalan dengan konsep keamanan dari Christian Bueger diantaranya yakni 1) keamanan laut itu sendiri, pandangan ini menempatkan perlindungan lingkungan laut dan konservasi, sumber daya kelautan hidup dan non hayati di garis depan masalah keamanan maritim. (Rahman, 2009) 2) Tata kelola laut, pendekatan ini ditetapkan sebagai konteks pengelolaan laut, dapat digambarkan sebagai penciptaan dan implementasi aturan dan praktik untuk mengatur penggunaan laut dan pengguna laut itu sendiri. 3) Perlindungan perbatasan maritim, memastikan bahwa kedaulatan dan hak-hak berdaulat di laut ditegakkan setelah ZEE di setujui dan klaim yurisdiksi yang meningkat atas wilayah laut yang berdekatan menyebabkan sejumlah perselisihan terjadi, menjadikan negara-negara dipaksa untuk memberikan perhatian yang lebih besar untuk pengawasan maritim. (Rahman, 2009) 4) Regulasi keamanan sistem transportasi laut, penetapan regulasi keamanan sistem transportasi laut oleh IMO untuk mencegah berbagai ancaman yang dapat terjadi pada transportasi laut diseluruh dunia. (Saraswati & Pinatih, 2020)

Berdasarkan pada konsep keamanan yang dikemukakan oleh Bueger, jika dianalisis berdasarkan pada permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa kekuatan laut (*sea power*) menjelaskan terkait dengan tindakan TNI AL dalam penanganan berbagai pelanggaran di ALKI II dan pengamanan jalur pelayaran internasional tersebut. Keselamatan laut (*marine safety*) dikaitkan dengan keselamatan kapal yang melintasi wilayah ALKI, angkatan laut berperan untuk menjaga jalur pelayaran, dan berbagai instalasi maritim untuk kebutuhan navigasi kapal sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia yang mengemban status negara kepulauan. Keamanan manusia (*human security*), penelitian ini akan melihat bagaimana strategi TNI AL dalam pengamanan ALKI II dari kejahatan yang mampu memberikan dampak terhadap keamanan manusia seperti IUU fishing yang masih banyak terjadi di perairan Indonesia.

Mengacu pada pendekatan keamanan maritim dari Chris Rahman jika dianalisis berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya yakni 1) Keamanan laut itu sendiri, dimana penelitian ini akan melihat peran dan strategi TNI AL dalam mengatasi pelanggaran hak-hak ALKI yang dapat menyebabkan pencemaran di laut mengingat banyaknya ancaman yang berdampak pada lingkungan bawah laut khususnya di ALKI II. 2) Tata kelola laut, yang dimana di ALKI II telah diberlakukan *traffic separation scheme* (TSS) khususnya di Selat Lombok yang merupakan skema pemisah jalur lalu lintas pelayaran, (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 2018) hal ini merupakan representasi tata kelola laut oleh Indonesia berdasarkan pada pendekatan keamanan maritim menurut Chris Rahman. 3) Perlindungan perbatasan maritim direpresentasikan melalui kerjasama TNI dengan militer Filipina dalam rangka memperketat pengawasan pulau kecil diantara perbatasan kedua negara untuk mengantisipasi aksi terorisme di Poso yang rawan melalui wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina Selatan. (Kharish, Syahtaria, Sianturi, Prakoso, Saragih, & Bangun, 2022) 4) Regulasi keamanan sistem

transportasi laut, Guskamla Koarmada II telah memastikan keamanan laut Indonesia tengah sebagai upaya untuk menopang jalur perekonomian dengan melakukan patroli rutin untuk mencegah terjadinya penyelundupan, perompakan, dan berbagai ancaman yang mampu mengancam kedaulatan laut Indonesia khususnya di perairan Indonesia bagian tengah yang mencakup ALKI II. (Harianto & Wahyudono, 2023)

KONSEP STRATEGI

Konsep strategi merupakan model yang digunakan dalam merancang strategi yang efektif, strategi militer terdiri dari penetapan tujuan militer, perumusan strategi militer untuk mencapai tujuan dan penggunaan sumber daya militer untuk melaksanakan strategi tersebut. (Lykke Jr, 1997) Lykke memberikan bentuk koheren pada konsep strategi dengan model strategi bangku berkaki tiga yang mengilustrasikan bahwa strategi = tujuan + cara + sarana, bangku akan miring jika ketiga kakinya tidak seimbang, jika terdapat kaki yang terlalu pendek maka menimbulkan resiko yang besar dan strategi akan gagal. (Yarger, 2008) Tiga karakteristik dari aspek strategi menurut Lykke yakni Tujuan (*Ends*), Cara (*Ways*) dan Sarana (*Means*), ketiga aspek ini saling berkaitan dalam penyusunan strategi. (Dalimunthe, Suwito, & Asmoro, 2023)

Aspek Tujuan (*Ends*) mengacu pada tujuan yang ingin dicapai dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Aspek Cara (*Ways*) menjabarkan terkait dengan 'bagaimana' tujuan harus dicapai berdasarkan pada sumber daya yang ada. Aspek Sarana (*Means*) mengacu pada sumber daya khusus yang digunakan untuk menerapkan suatu strategi untuk mencapai tujuan. (Dalimunthe, Suwito, & Asmoro, 2023) Selain dari tiga aspek tersebut terdapat Risiko (*Risk*) yang menjelaskan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dengan cara dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan, karena tidak pernah ada sumber daya yang cukup atau cara yang cukup cerdas untuk menjamin kesuksesan 100% dalam lingkungan internasional yang kompetitif, selalu ada risiko, hal ini diminimalisir dengan keseimbangan antara tujuan, cara dan sarana. (Yarger, 2008)

Maka jika melihat kondisi lingkungan strategis di ALKI II dengan berbagai ancaman dan pelanggaran, TNI AL menjalankan strategi untuk menciptakan ALKI II yang aman dari berbagai ancaman. Kondisi tersebut diciptakan melalui strategi TNI AL yang dijabarkan berdasarkan 3 aspek strategi menurut Lykke yakni aspek Tujuan (*Ends*) digambarkan dengan tujuan TNI AL dalam pengamanan ALKI II yakni untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai bentuk ancaman dari dalam maupun luar negeri, (Kementerian Pertahanan RI, 2015) dengan sasaran untuk mencegah niat dari pihak pengganggu, menanggulangi berbagai macam ancaman, dan menciptakan kondisi perairan yurisdiksi yang terkendali. (Putra A & Pramono, 2017)

Aspek Cara (*Ways*) digambarkan dengan strategi generik utama TNI AL berupa strategi pertahanan berlapis, strategi penangkalan dan strategi pengendalian laut, dimana strategi tersebut direalisasikan melalui OMSP yang berdasarkan pada kondisi lingkungan strategis yakni operasi kerjasama dengan atase pertahanan negara kapal, operasi pengamanan ALKI II bersifat semesta, operasi pengamanan ALKI II bersifat defensif aktif, operasi pengamanan *Traffic Separation Scheme*, dan sinergitas antar *stakeholder*.

Aspek Sarana (*Means*), untuk mencapai tujuan dengan melalui berbagai strategi dan operasi, maka dibutuhkan sumber daya, dalam pelaksanaan strateginya TNI AL memanfaatkan

6 elemen kekuatan laut yang dijabarkan dalam *Sea Power Theory* yakni letak geografis, sifat fisik, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter bangsa dan karakter pemerintahan. Selain itu, TNI AL juga memanfaatkan sumber daya khusus berupa kekuatan TNI AL yang ditingkatkan untuk mencapai gagasan *World Class Navy*.

Dalam menjalankan strategi dan operasi, terdapat tantangan yang menjadikan pengamanan wilayah ALKI II belum sempurna, tantangan yang dihadapi berupa anggaran dimana jenis ancaman yang terjadi di ALKI II beragam sehingga membutuhkan modernisasi alat pertahanan dan alutsista, anggaran pertahanan yang tidak memadai menjadikan sumber daya tidak terpenuhi, hal ini menjadikan model strategi kursi berkaki tiga menurut Lykke tidak seimbang sehingga terdapat risiko dalam strategi ini yakni TNI AL belum mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Namun melalui gagasan *world class navy*, sumber daya berupa alutsista dan kemampuan mulai di tingkatkan, maka tujuan akan tercapai secara bertahap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

LANDASAN FUNDAMENTAL STRATEGI TNI AL

Sebagai upaya dalam mewujudkan cita-cita atau tujuan nasionalnya, suatu negara harus memiliki strategi nasional berdasarkan keadaan negara yang statis dan dinamis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bagi Indonesia sendiri, strategi dapat berupa metode untuk mencapai cita-cita proklamasi dengan UUD 1945 sebagai pegangan dalam menjalankan strategi nasional. (Suratmin) UUD 1945 menjadi dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara, dapat dilihat pada UUD NKRI 1945 yang berkaitan dengan pokok-pokok pikiran tentang penyelenggaraan pertahanan negara yang dijiwai oleh Pancasila. Pancasila merupakan landasan ideal, ideologi nasional dan dasar negara, nilai-nilai Pancasila menjadi bagian yang penting karena menjadi titik tolak pertahanan negara dalam menjamin keutuhan NKRI, sehingga tujuan pembentukan negara dapat tercapai.

UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan fundamental strategi TNI AL telah menetapkan beberapa produk perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pertahanan negara dimana TNI memiliki peran sebagai alat pertahanan negara, maka dalam melaksanakan perannya diperlukan doktrin sebagai pedoman mulai dari teori bersifat konseptual sampai dengan yang bersifat operasional implementatif. (Tentara Nasional Indonesia, 2010) Adapun doktrin TNI yakni Tri Darma Eka Karma, yang merupakan doktrin induk yang berada pada tataran strategis dan menjadi acuan bagi doktrin angkatan. Doktrin Tri Darma Eka Karma memberikan suatu pengertian luhur yang merupakan pengabdian tiga matra dalam satu jiwa, tekad dan semangat perjuangan TNI. Doktrin menjadi penting karena dengan permasalahan keamanan yang semakin kompleks dan kondisi lingkungan strategis yang senantiasa berubah secara dinamis, maka diperlukan adanya pedoman yang jelas menyangkut peran, fungsi dan tugas pokok TNI. (Tentara Nasional Indonesia, 2010)

Peran TNI yakni sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara, dengan tiga fungsi TNI yakni sebagai penangkal, penindak, dan pemulih. TNI berfungsi sebagai penangkal dari ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan negara, penindak terhadap segala bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata, serta pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat adanya kekacauan

keamanan. Sedangkan tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. (Tentara Nasional Indonesia, 2010) Tugas pokok ini dilakukan dengan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Adapun operasi berupa OMP maupun OMSP TNI AL berlandaskan pada doktrin TNI AL yang merupakan pedoman untuk menentukan arah kebijakan, pengembangan dan pemanfaatan kekuatan laut, serta panduan dalam bertindak untuk mencapai tujuannya. (Kusuma, Prakoso, & Sianturi, 2021) TNI AL memiliki doktrin Jalesveva Jayamahe yang diambil dari bahasa Sansekerta yang berarti Justru di Lautan Kita Menang atau Kejayaan Kita Ada di Laut. Sebagai bagian dari TNI, maka doktrin TNI AL Jalesveva Jayamahe berkedudukan di bawah doktrin Tri Dharma Eka Karma, doktrin ini menjadi pedoman tertinggi dalam penyusunan doktrin TNI AL dibawahnya, yaitu doktrin tingkat operasional dan taktis. Doktrin Tri Dharma Eka Karma adalah doktrin penggunaan kekuatan TNI dan doktrin Jalesveva Jayamahe adalah doktrin pembangunan kekuatan TNI AL. (Kusuma, Prakoso, & Sianturi, 2021)

Doktrin ini menekankan untuk menjaga kepentingan negara yang melalui batas-batas laut untuk melindungi keamanan maritim. Sesuai dengan arti dari doktrin Jalesveva Jayamahe yakni “Justru di Lautan Kita Menang” atau “Kejayaan Kita Ada di Laut”, maka doktrin ini berpandangan bahwa dengan adanya angkatan laut yang jaya akan menciptakan kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim terjaga. (Tim SINDOnews, 2022) Doktrin Jalesveva Jayamahe sebagai doktrin pembangunan TNI AL yang terbentuk dari landasan fundamental Republik Indonesia yakni UUD 1945 dan Pancasila, serta berkedudukan dibawah doktrin Tri Dharma Eka Karma akan menjadi acuan dalam setiap tindakan implementasi strategi yang akan disusun oleh TNI AL.

PERAN DAN STRATEGI TNI AL DALAM MENGHADAPI ANCAMAN DI ALKI II

Sebagai jalur pelayaran internasional, ALKI II rentan terhadap berbagai ancaman, maka strategi TNI AL dalam pengamanan ALKI II menjadi penting dengan penggunaan strategi berdasarkan pada UUD 1945 yang kemudian menjadi suatu operasi berupa OMSP berdasarkan pada ancaman dan pelanggaran di wilayah tersebut, hal ini dijabarkan dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

a. Ancaman Maritim di ALKI II

Ancaman maritim yang terjadi di ALKI II dapat berupa ancaman tradisional dan ancaman non tradisional. Maka dalam penelitian ini, penulis mengklasifikasikan kedalam dua jenis ancaman yakni:

1. Ancaman Tradisional di ALKI II

Ancaman tradisional merupakan ancaman yang melibatkan negara sebagai aktor tunggalnya, yang bertujuan untuk mengancam keamanan atau kedaulatan suatu negara melalui aspek militer sebagai sektor utamanya. (Rania, 2022) Adapun dalam kasusnya, ancaman tradisional yang terjadi di ALKI II dan sekitarnya berupa:

- Ancaman Pelanggaran Wilayah Yurisdiksi

Pada 3 Juli 2003 pelanggaran terhadap hak lintas ALKI dilakukan oleh empat pesawat F-18 Hornet milik angkatan laut Amerika Serikat, pesawat tersebut terbang

diwilayah udara Indonesia diatas Laut Jawa tanpa izin. (Bunga, 2017) Pesawat milik AS tersebut sempat melakukan manuver pada jalur penerbangan sipil sehingga mengganggu penerbangan sipil dan telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam UNCLOS 1982. (Bunga, 2017) Ancaman lain juga datang dari Malaysia yang juga melakukan pelanggaran wilayah yurisdiksi Indonesia melalui laut. Pelanggaran pertama dilakukan oleh Polis Marin Malaysia pada bulan Juni 2020 di perairan yang dekat dengan Pos Sekaca yang dijaga oleh Satgas Pamtas RI-Malaysia. (Zulfiqor, 2020) Sedangkan pelanggaran kedua dilakukan oleh kapal petugas maritim Malaysia, pelanggaran terjadi di Nunukan, Kalimantan Utara dekat dengan Pos AL Sei Pancang.

Mengacu pada konsep keamanan maritim menurut Bueger dalam pendekatan kekuatan laut atau kekuatan angkatan lautnya (*sea power*) yang berkaitan dengan keamanan maritim dan kekuatan angkatan laut, maka keamanan maritim Indonesia masih belum maksimal jika dilihat dari ancaman pelanggaran wilayah yurisdiksi yang dapat mempengaruhi kedaulatan negara, sehingga untuk mencapai keamanan maritim dibutuhkan strategi dan operasi pengamanan oleh TNI AL, khususnya di wilayah laut krusial seperti ALKI II yang merupakan jalur pelayaran internasional, sehingga rawan terhadap ancaman dan pelanggaran.

- Spionase

Kegiatan intelijen melalui berbagai cara dan metode kerap dilakukan oleh berbagai negara Pada kasusnya, telah terjadi kejahatan spionase di wilayah sekitar ALKI II, pada 26 Desember 2020 telah ditemukan *SeaGlider* yang merupakan drone bawah laut atau *unmanned underwater vehicle* (UUV) di lepas pantai Kepulauan Selayar. *SeaGlider* menjadi ancaman spionase karena dapat digunakan untuk pengumpulan data oseanografi dan mendukung riset bawah laut. (Rezkisari, 2021) Selain itu, data yang didapatkan juga mampu menyokong operasi kapal selam yang merupakan persenjataan strategis bagi angkatan laut. *SeaGlider* yang ditemukan diduga milik China karena terdapat aksara China yang bertuliskan nama China Sheyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences. (Hakim, 2021) Selanjutnya, pada 18 Februari 2022, kembali ditemukan *SeaGlider* di wilayah yang berdekatan dengan lokasi penemuan *SeaGlider* sebelumnya. *SeaGlider* ini ditemukan oleh nelayan dalam keadaan masih menyala diperaian Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan (Cipto, 2022) Jika *SeaGlider* yang sebelumnya ditemukan pada 2020 milik China, namun yang ditemukan saat ini merupakan *SeaGlider* buatan USA.

Berdasarkan pada konsep keamanan maritim pada pendekatan kekuatan laut atau kekuatan angkatan laut (*sea power*), yang mengacu pada tindakan angkatan laut sebagai faktor utama keamanan maritim. (Wiranto, 2020) Maka berdasarkan pada konsep tersebut, untuk mencapai keamanan maritim diperlukan tindakan pengawasan oleh TNI AL ataupun peningkatan teknologi seperti radar yang mampu mendeteksi teknologi-teknologi bawah laut sehingga ancaman seperti spionase dapat diminimalisir.

2. Ancaman Non Tradisional di ALKI II

Ancaman non tradisional dapat didefinisikan sebagai bentuk ancaman yang berasal dari aktor non negara atau ancaman non fisik oleh kelompok atau perseorangan, ancaman tidak lagi bersumber dari negara lain tetapi dari individu atau kelompok. (Azizah, 2021)

Adapun dalam kasusnya, ancaman non tradisional yang mengancam wilayah ALKI II diantaranya, yakni:

- *Transnational Organized Crime (TOC)*

Ancaman non tradisional berupa TOC banyak terjadi di ALKI II, beberapa kasusnya berupa penyelundupan narkoba, senjata api illegal ataupun *human trafficking*. Merujuk ke kasus penyelundupan narkoba, peredaran gelap narkoba melalui laut masih mendominasi di Indonesia, dengan luas wilayah perairan menjadi celah bagi sidikat jaringan internasional untuk memasukan narkoba yang berasal dari *Golden Triangle* ke wilayah Indonesia. (Humas BNN, 2021) Kasus TOC juga mencakup kejahatan penyelundupan senjata api illegal. Pada kasusnya di ALKI II, ditemukan senjata api ilegal jenis M-16 yang diselundupkan oleh pemimpin Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso yang merupakan senjata buatan Amerika Serikat yang berasal dari Filipina. (Ramadhan & Widodo, 2016) Selain dua kasus tersebut, kasus TOC juga mencakup kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau *Human Trafficking*. Tindakan TPPO dengan melalui laut menjadi ancaman maritim khususnya di wilayah sekitar ALKI II, Kalimantan Utara menjadi wilayah Indonesia yang berbatasan darat dan laut dengan Malaysia, situasi ini memudahkan warga untuk melintasi perbatasan dan rentan menjadi korban TPPO. (Dikominfo Provinsi Kalimantan Utara, 2021)

Mengacu pada konsep keamanan maritim menurut Chris Rahman pada pendekatan regulasi keamanan sistem transportasi laut yang berkaitan dengan eksploitasi dan dominasi kelompok seperti teroris ataupun berbagai ancaman lain. Maka, berdasarkan pada ancaman TOC tersebut dengan penyelundupan senjata banyak dilakukan untuk teroris serta kejahatan TOC lainnya, maka keamanan maritim dapat dicapai dengan peningkatan keamanan sistem transportasi laut, hal ini menjadi penting mengingat kejahatan TOC banyak terjadi melalui transportasi laut.

- *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF)*

Jika ditinjau dari aktivitas IUUF, wilayah ALKI II dan sekitarnya merupakan wilayah dengan intensitas IUUF yang cukup tinggi. Pada kasus yang terjadi di ALKI II berupa *illegal fishing* oleh kapal Filipina yang berperan sebagai pengumpul ikan sebelum nantinya dijaring oleh kapal ikan. (Dimas, 2021) Kasus *unreported fishing* yang terjadi di ALKI II selama tahun 2021, sebanyak 78 kapal ikan yang merupakan milik Indonesia yang tidak memiliki dokumen lengkap. (Mega, 2021) Sedangkan untuk kasus *unregulated fishing* yang terjadi di ALKI II berupa penangkapan ikan di Laut Sulawesi yang dilakukan oleh nelayan asal Malaysia dengan menggunakan bom ikan yang dapat merusak karang sehingga merusak lingkungan laut. (Suwarsono, 2022)

Ancaman IUU *fishing* tersebut mempengaruhi keamanan manusia dalam konsep keamanan maritim, berdasarkan pada keamanan maritim menurut Bueger kemananan manusia menjadi penting untuk dapat mencapai keamanan maritim karena mengacu pada keamanan nasional dengan memusatkan pada kebutuhan rakyat mengingat bidang perikanan menjadi sumber makanan dan mata pencaharian masyarakat pesisir, (Bueger, 2015) sehingga tindakan IUU *fishing* merupakan hambatan bagi tercapainya keamanan maritim.

- Ancaman Lingkungan

Pencemaran yang dilakukan di lingkungan laut dapat merusak biota laut, sehingga perlu untuk memperhatikan keseimbangan serta kelestarian lingkungan laut. (Sudini, 2011) Namun pada realitasnya, tidak sedikit dari kapal-kapal tersebut melakukan pencemaran di laut dengan membuang *ballast water* (Alamsyah, Ariadno, Arsegianto, & Simanjuntak, 2022) yang merupakan pemberat bagi kapal yang bermuatan kosong untuk menjaga keseimbangan kapal, hal ini menjadi berbahaya karena terdapat berbagai jenis spesies yang hidup didalam *ballast water* yang mampu membahayakan kehidupan lingkungan laut dan mengubah ekosistem di laut. (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 2015) Selain itu, kapal tongkang batu bara kerap melintasi ALKI II sehingga dapat berpotensi mencemari lingkungan karena kapal tongkang sebagai kapal curah kering tidak pernah bersih. (Alamsyah, Ariadno, Arsegianto, & Simanjuntak, 2022)

Ancaman lingkungan yang banyak terjadi di wilayah ALKI II berpengaruh terhadap tercapainya keamanan maritim, berdasarkan pada konsep keamanan maritim menurut Chris Rahman, keamanan maritim mencakup keamanan laut itu sendiri, hal ini menempatkan perlindungan lingkungan laut dan konservasi, sumber daya kelautan hidup dan non hayati berada pada garis depan masalah keamanan maritim, (Rahman, 2009) sehingga dengan adanya ancaman lingkungan yang terjadi di laut maka keamanan maritim Indonesia belum dapat terpenuhi.

- Kecelakaan Laut

Kasus kecelakaan banyak terjadi di laut Indonesia, berdasarkan data dari *Indonesia Maritime Information Centre* sebanyak 1.562 kasus kecelakaan laut dari tahun 2021-2022. (Indonesia Coast Guard, 2023) Contoh kasusnya tubrukan kapal terjadi di alur pelayaran Taboneo, Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang letaknya cukup dekat dengan ALKI II. Tubrukan terjadi antara kapal penumpang KM Dharma Rucitra 1 dengan tongkang batu bara, mengakibatkan kapal penumpang ringsek dan batu bara yang dimuat oleh tongkang tumpah ke laut.

Berdasarkan pada konsep keamanan maritim menurut Bueger dalam keselamatan laut (*marine safety*) yang berkaitan dengan keselamatan kapal dan instalasi maritim, (Bueger, 2015) serta pada pendekatan tata kelola laut menurut Chris Rahman, yang berkaitan dengan pengelolaan laut yang mengatur penggunaan dan pengguna laut itu sendiri, (Rahman, 2009) jika mengacu pada ancaman kecelakaan laut tersebut maka untuk mencapai keamanan maritim diperlukan peningkatan dalam tata kelola laut dan keselamatan laut, baik dengan pembaharuan teknologi sebagai alat navigasi kapal ataupun pemberlakuan berbagai prosedur untuk mengatur pengguna laut

b. Operasi Militer Selain Perang TNI AL dalam Menghadapi Ancaman di ALKI II

TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut berpegang pada doktrin sebagai landasan strategi dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini untuk menghadapi ancaman terhadap aspek kelautan dan menciptakan situasi laut yang aman terkendali di wilayah yurisdiksi nasional (Kusuma, Prakoso, & Sianturi, 2021) sesuai dengan konsep keamanan maritim oleh Bueger, bahwa laut yang aman dapat dilihat dari keadaan tidak adanya ancaman dan gangguan keamanan tersebut. (Bueger, 2015) Sebagai tanggung jawabnya

dalam melaksanakan tugas pokok berdasarkan pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, TNI AL memiliki empat peran utama yang meliputi peran militer (*military role*), berupa penggunaan kekuatan secara optimal dalam perang atau konflik bersenjata di laut untuk mempertahankan kedaulatan dan pertahanan negara melalui pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Peran penegakan hukum di laut (*law enforcement role*), dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional di laut, menjaga keamanan dan penegakkan hukum di laut, termasuk pencegahan dan penindakan terhadap tindakan ilegal di laut seperti *illegal fishing* dan *transnational organized crime*. Peran diplomasi (*diplomacy role*), merupakan peran global bagi setiap angkatan laut di seluruh dunia. Peran dukungan, merupakan peran TNI AL yang bertujuan untuk mendukung tugas pemerintah atau tugas kemanusiaan. (Kusuma, Prakoso, & Sianturi, 2021)

Berdasarkan pada empat peran TNI AL tersebut, peran penegakan hukum di laut (*law enforcement role*) mencakup pengamanan terhadap wilayah ALKI, TNI AL melalui strategi-strateginya sebagai tindak lanjut dari amanat undang-undang pertahanan negara dan doktrin Jalesveva Jayamahe, berperan untuk mengamankan wilayah laut Indonesia yang krusial karena sebagai jalur pelayaran internasional. Strategi TNI AL dalam pengamanan wilayah laut Indonesia khususnya di ALKI II dilaksanakan berdasarkan pada perkembangan lingkungan strategis dengan diselenggarakan melalui operasi gabungan, operasi matra dan operasi bantuan serta didukung oleh kekuatan nasional. (Putra A & Pramono, 2017)

Mengacu pada konsep strategi menurut Lykke bahwa dalam menjalankan strategi militer dirumuskan dalam tiga substansi dasar yang meliputi apa yang dipertahankan, bagaimana cara mempertahankan, dan dengan apa mempertahankan, hal ini dijabarkan dengan tujuan dan sasaran (*Ends*), cara mencapai sasaran (*Ways*) dan sumber daya yang digunakan (*Means*). (Lykke Jr, 1997) Tujuan (*Ends*) dari strategi pertahanan laut tersebut yakni menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa dari berbagai bentuk ancaman dari dalam maupun luar negeri, tujuan ini dapat tercapai melalui kebijakan pertahanan yang dirumuskan dalam sasaran strategi pertahanan laut. (Kementerian Pertahanan RI, 2015) Terdapat tiga sasaran dari strategi pertahanan laut yakni mencegah niat dari pihak pengganggu, menanggulangi berbagai macam ancaman, dan menciptakan kondisi perairan yurisdiksi yang terkendali. Aspek kedua dari konsep strategi yakni cara mencapai tujuan (*Ways*), tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai dengan tiga strategi generik utama yakni strategi pertahanan berlapis (*layer defence strategy*), strategi penangkalan (*deterrence strategy*), dan strategi pengendalian laut (*sea control strategy*). (Putra A & Pramono, 2017)

Strategi pertahanan berlapis digunakan untuk menghadapi kondisi keamanan dalam keadaan krisis atau perang dengan melibatkan daerah yang dijadikan medan penyanggah, medan pertahanan utama dan daerah perlawanan. Sedangkan strategi penangkalan dan strategi pengendalian laut digunakan dalam kondisi damai dengan melalui diplomasi maritim seperti operasi Kartika Jala Krida oleh KRI Dewa Ruci dan Bima Suci. Strategi pengendalian laut dijalankan melalui operasi siaga tempur di perairan rawan selektif seperti perbatasan dan perairan krusial berupa ALKI khususnya di ALKI II, selain itu juga operasi ini berupa operasi laut sehari-hari yang berupa operasi keamanan laut dan operasi bantuan (Putra A & Pramono, 2017) dengan satuan operasi yang dibentuk oleh Koarmada II yakni Gugus

Tempur Laut Komando Armada II dan Gugus Keamanan Laut Komando Armada II. (Dispen Komando Armada II, 2018)

Selain dari tiga strategi generik utama tersebut, terdapat beberapa operasi pengamanan melalui OMSP di ALKI II oleh TNI AL yang berdasarkan pada kondisi lingkungan strategis, operasi ini dirumuskan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran (*Ways*) berdasarkan pada konsep strategi menurut Lykke. Adapun OMSP yang dilakukan TNI AL sebagai upaya mengatasi ancaman di ALKI II sebagai berikut:

1. Operasi Kerjasama dengan Atase Pertahanan Negara Kapal

Dalam beberapa kasus, pelanggaran yang dilakukan oleh kapal atau pesawat asing yang menggunakan hak lintas di ALKI II tidak dapat dihentikan, berdasarkan pada aturan penggunaan hak lintas ALKI bahwa kapal yang melintas harus berlayar dengan kecepatan stabil dan secepat mungkin, sehingga tidak semua kapal yang melakukan pelanggaran dapat dihentikan dan diproses secara langsung, TNI AL tidak dapat melakukan penangkapan ditempat. Ketika terjadi pelanggaran di wilayah ALKI II, TNI AL melakukan tindakan OMSP melalui kerjasama dengan negara kapal, TNI AL melakukan pelaporan terhadap pelanggaran yang terjadi kepada kedutaan besar negara kapal yang melanggar, di beberapa negara terdapat atase pertahanan yang dikirim sebagai penghubung angkatan bersenjata ataupun kementerian pertahanan negara, sehingga informasi terkait dengan pelanggaran tersebut akan diteruskan oleh atase pertahanan kepada kedutaan besar negara kapal. (Kapten Laut (P) Taufik Yudha Laksana, 2023) Strategi dalam menangani pelanggaran melalui kerjasama dengan atase pertahanan dari negara kapal yang melanggar berguna untuk menghadapi ancaman-ancaman berupa pelanggaran wilayah yurisdiksi Indonesia, ancaman lingkungan, spionase dan berbagai ancaman lain ketika kapal yang melanggar tidak boleh dihentikan selama menggunakan hak lintas ALKI II.

Strategi TNI AL dalam mengatasi ancaman melalui kerjasama dengan negara kapal tersebut akan berjalan baik jika didukung melalui kerjasama atau hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara di dunia. Berdasarkan pada elemen *sea power* menurut Mahan yakni karakter pemerintahan (*character of government*) yang menjadi penting untuk dapat mendukung strategi tersebut karena kebijakan pemerintah akan mempengaruhi perkembangan kekuatan laut negara, (Anwar, 2018) hubungan diplomatik yang baik yang dijalin Indonesia dengan berbagai negara akan memudahkan dalam kerjasama untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kapal yang melintas di perairan Indonesia. Disisi lain, gagasan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia menjadikan pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap laut, baik dari segi keamanan ataupun pembangunannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap upaya pengamanan ALKI II oleh TNI AL.

2. Operasi Pengamanan ALKI II Bersifat Semesta

Pertahanan bersifat semesta merupakan strategi pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya. Berdasarkan pada strategi pertahanan laut yang bersifat semesta, dalam melakukan pengamanan terhadap berbagai ancaman di wilayah ALKI II, TNI AL melibatkan masyarakat dan nelayan sebagai sumber informasi terkait dengan berbagai pelanggaran seperti IUU *fishing*, TOC, ataupun

ancaman spionase yang terjadi di ALKI II dan wilayah sekitarnya. TNI AL memberikan pembinaan terhadap warga sekitar pesisir pantai serta nelayan, sehingga informasi terkait kapal-kapal yang melakukan pelanggaran akan didapatkan dari laporan nelayan dan warga setempat. (Kapten Laut (P) Taufik Yudha Laksana, 2023)

Berangkat dari salah satu elemen *sea power* oleh Mahan, peran masyarakat dalam strategi pertahanan laut tersebut masuk kedalam salah satu elemen *sea power* yakni karakter bangsa (*character of the people*), dengan karakter bangsa yang menyadari bahwa laut merupakan wilayah yang krusial sehingga rawan terhadap berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan, serta karakter bangsa yang menyadari bahwa laut memiliki peluang dan manfaat besar yang mampu mendukung *sea power* Indonesia sehingga dengan *sea power* yang dimiliki dapat menjadi penyokong bagi TNI AL dalam pengamanan wilayah ALKI II dan mencapai gagasan sebagai *World Class Navy*. Karakter bangsa yang berorientasi pada laut tidak terlepas dari karakter pemerintahannya (*character of government*) yang merupakan elemen *sea power*, hal ini terbukti dengan sistem pertahanan yang melibatkan masyarakat dalam strategi pengamanan ALKI II menjadikan masyarakat melek terhadap ancaman dan pentingnya peran laut bagi Indonesia, hal ini menjadi pendukung bagi sasaran strategi pengamanan untuk mencapai tujuan. Operasi ini juga didukung oleh jumlah penduduk Indonesia yang mampu menjadi kekuatan pendukung dalam operasi TNI AL, hal ini selaras dengan elemen *sea power theory* yakni jumlah penduduk (*number of population*) yang menekankan pada pentingnya jumlah penduduk dalam suatu negara, sehingga potensi ini dapat menjadi pendukung dalam strategi TNI AL dalam pengamanan ALKI II.

3. Operasi Pengamanan ALKI II Bersifat Defensif Aktif

Pertahanan defensif aktif adalah pertahanan yang bersifat tidak agresif serta tidak ekspensif, akan tetapi pertahanan ini tetap mengedepankan kepentingan nasional. Operasi pertahanan laut dilakukan dengan defensif aktif yakni megedepankan diplomasi dalam mengatasi ancaman militer, dengan didukung oleh pertahanan militer dan nirmiliter sebagai upaya memperkuat upaya diplomasi, namun apabila upaya diplomasi gagal maka akan dilakukan tahapan lanjutan dengan melalui pertahanan militer. (Kementerian Pertahanan RI, 2015) Pertahanan defensif aktif oleh TNI AL dilakukan melalui diplomasi berupa operasi muhibah atau operasi Kartika Jala Krida. Selain itu pertahanan defensif aktif juga dilakukan dengan melalui kerjasama dengan negara tetangga dalam berbagai operasi seperti Malindo, Indosin, Ausindo, Indothai, Philindo, dan sebagainya.

Pertahanan defensif aktif juga dilakukan dengan penataan kawasan ruang pertahanan, dukungan logistik pertahanan melalui pembangunan nasional dengan tujuan kesejahteraan bersama. Adapun hal tersebut diwujudkan dengan peningkatan alutsista yang dimiliki oleh TNI AL, hal ini mendukung dalam upaya pengamanan ALKI II. Berdasarkan pada pernyataan Dan KAL Belongas dalam wawancara pada 13 Maret 2023, pada wilayah ALKI II sebanyak 4 KRI yang dikerahkan untuk melakukan patroli disebarkan dari Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi, didukung oleh KAL yang berdasarkan pada patroli kewilayahan. (Kapten Laut (P) Taufik Yudha Laksana, 2023) Jumlah KRI dan KAL yang dikerahkan belum mampu mengamankan wilayah ALKI II secara keseluruhan, sehingga dengan meningkatkan jumlah alutsista yang dimiliki

dapat mendukung operasi pengamanan wilayah ALKI II, hal ini juga sebagai upaya untuk memenuhi MEF yang ditargetkan untuk mewujudkan TNI AL sebagai *World Class Navy*.

Operasi yang bersifat defensif aktif dengan melalui penataan kawasan ruang pertahanan dan pembangunan nasional termasuk kedalam elemen *sea power* yakni sifat fisik (*physical conformation*) yang mengedepankan pembangunan wilayah maritim sebagai pendukung dan memperkuat pertahanan laut. (Anwar, 2018) Dengan melakukan peningkatan pada pembangunan nasional di wilayah maritim seperti pelabuhan dalam ataupun berbagai kebutuhan navigasi, serta peningkatan kekuatan berupa alutsista dapat menjadi pendukung dalam pengamanan ALKI II oleh TNI AL.

4. Operasi pengamanan *Traffic Separation Scheme* (TSS)

Indonesia memiliki 2 jalur TSS, salah satunya berada di Selat Lombok yang merupakan ALKI II, dengan adanya TSS menjadikan pemerintah harus memenuhi sarana dan prasarana penunjang keselamatan pelayaran di area TSS yang meliputi *Vessel Traffic Services* (VTS), Stasiun Radio Pantai (SROP), Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), SDM Pengelola Stasiun VTS, serta peta elektronik terbaru yang mampu menjamin operasional perangkat penunjang keselamatan selama 24 jam 7 hari. (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 2019) Hal ini menjadi sebuah keuntungan bagi strategi TNI AL dalam pengamanan wilayah ALKI II dari ancaman tubrukan di laut.

Operasi pengamanan TSS menjadi bentuk implementasi dari strategi TNI AL dalam mengamankan jalur ALKI II dari ancaman tubrukan kapal, dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana TSS dapat menjadi pendukung dalam memantau aktivitas kapal yang berlalu lalang di wilayah ALKI II, sehingga dengan diberlakukannya TSS di ALKI II menjadi keuntungan bagi strategi pengamanan ALKI II oleh TNI AL. Penetapan TSS ini menjadi representasi dari *sea power theory* menurut Mahan dalam elemen letak geografis (*geographical position*), dengan letak geografisnya menjadikan Indonesia memiliki 4 dari 9 *choke point* dunia, dan 2 diantaranya yakni Selat Lombok dan Selat Makassar yang berada di ALKI II, *choke point* ini menjadi selat utama sebagai jalur bagi kapal-kapal besar niaga seperti tanker dan *mother vessel*. (Hadyanti, Prakoso, & Rudiawan, 2021) Hal ini menjadikan kedua selat tersebut sangat padat dan membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, sehingga IMO menetapkan TSS di Selat Lombok. (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 2018) Maka dengan disahkannya TSS, menjadikan wilayah tersebut dilengkapi dengan berbagai teknologi yang dapat mendukung strategi pengamanan ALKI II oleh TNI AL.

5. Sinergitas antar *Stakeholder*

Wilayah laut Indonesia yang luas dengan posisinya geografis yang strategis, menjadikan potensi ancaman semakin besar dan mampu mengganggu stabilitas keamanan laut. TNI AL sebagai lembaga pengamanan di laut mengerahkan 4 KRI di ALKI II dan didukung oleh beberapa KAL dengan patroli kewilayahan, dengan jumlah KRI yang dikerahkan terbatas menjadikan wilayah ALKI II tidak dapat diamankan secara menyeluruh oleh TNI AL, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan unsur-unsur lembaga terkait, melalui operasi gabungan bersama Polairud, Bea Cukai, Bakamla, Interpol dan lembaga lainnya. (Ansori, Ikhsanudin, & Suhardono, 2017)

Operasi ini merupakan implementasi dari *sea power theory* yakni luas wilayah suatu negara (*exantent of territory*) yang berkaitan dengan garis pantai dan tingkat kesulitan

dalam mengamankan wilayah tersebut, serta wilayah terluar yang dianggap rentan dan penting untuk diperhatikan. (Fitriyanti, 2020) Mahan dalam teorinya juga menjelaskan bahwa sebuah negara harus memiliki kekuatan maritim serta sarana dan prasarana yang memadai sehingga tidak hanya mengandalkan angkatan laut saja, (Ansori, Ikhsanudin, & Suhardono, 2017) hal ini dapat dikorelasikan dengan sinergitas dengan instansi berwenang di laut seperti Bakamla dengan TNI AL dan instansi terkait lainnya.

Strategi-strategi yang dilakukan oleh TNI AL tersebut merupakan perwujudan dari upaya untuk mencapai keamanan maritim yang dicita-citakan sesuai dengan konsep keamanan maritim bahwa laut yang aman dapat dilihat dari tidak adanya ancaman. Mengacu pada aspek ketiga dalam konsep strategi menurut Lykke yakni sarana (*Means*), dapat digambarkan pada pelaksanaan strategi dan operasi TNI AL yang tidak terlepas dari *sea power* yang dimiliki Indonesia sebagai elemen penting dalam mendukung keberhasilan strategi tersebut, enam elemen *sea power* menjadi sarana atau sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan operasi untuk mencapai tujuan.

Adapun dalam menjalankan berbagai operasi, terdapat tantangan yang menjadikan pengamanan wilayah ALKI II belum sempurna, tantangan yang dihadapi TNI AL dalam pengamanan wilayah ALKI II salah satunya berupa anggaran. Pada era globalisasi ini, bentuk dan jenis ancaman yang dihadapi kian beragam, sehingga kebutuhan atas alat-alat pertahanan berupa alutsista ataupun kelengkapan alat komunikasi dan navigasi di laut semakin meningkat, hal ini menjadikan anggaran terhadap pertahanan sangat berpengaruh terhadap pengamanan wilayah ALKI II.

Dalam analisisnya berdasarkan konsep strategi menurut Lykke, hal tersebut mengacu pada risiko (*Risk*) dimana sumber daya yang tidak memadai menjadikan 3 aspek strategi tidak seimbang sehingga ada risiko yang dapat terjadi, risiko tersebut berupa pengamanan ALKI II yang tidak maksimal menjadikan ancaman dan pelanggaran masih dapat terjadi dan tujuan tidak dapat tercapai. Namun risiko dapat diminimalisir dengan upaya peningkatan kekuatan dan alutsista melalui gagasan *world class navy* sehingga aspek strategi dapat seimbang dan tujuan dapat tercapai.

GAGASAN *WORLD CLASS NAVY* SEBAGAI PENDUKUNG STRATEGI TNI AL

TNI AL telah membuat paradigma baru dengan visi yang digagas oleh Laksamana TNI (purn.) Dr. Marsetio yang bertujuan untuk menjadikan TNI Angkatan Laut kelas dunia. (Yakti, 2017) *World class navy* atau TNI AL berkelas dunia yakni TNI AL yang dapat menghadirkan kekuatannya diberbagai belahan dunia. Maka, untuk dapat menjadikan TNI AL sebagai *world class navy*, terdapat standarisasi-standarisasi yang perlu dipenuhi, hal ini mencakup berbagai kebutuhan ideal proyeksi kekuatan TNI AL yang harus direalisasikan untuk mencapai gagasan *world class navy*. Kebutuhan-kebutuhan tersebut berupa kebutuhan postur pertahanan seperti alutsista yang dilaksanakan secara bertahap melalui program pembangunan *Minimum Essential Force* (MEF) yang harus dicapai hingga tahun 2024 yakni 151 KRI, 54 pesawat udara, serta 333 kendaraan taktis dan jumlah batalion yang perlu ditambahkan. (Supandi, 2018)

Menjadi *world class navy* bukan hanya unggul dalam alutsista, namun juga unggul pada 4 aspek yakni *pertama*, unggul sumber daya manusia (*excellent human resources*), personel dengan kapasitas dan kapabilitas yang tinggi berkontribusi tinggi dalam mewujudkan gagasan TNI AL sebagai *world class navy*. Sebagai upaya peningkatan kualitas SDM, TNI AL

melaksanakan beberapa program seperti peningkatan pendidikan serta latihan profesi yang menyesuaikan dengan teknologi alutsista, perkembangan iptek dan kebutuhan instansi. TNI AL juga mengirim personel untuk mengikuti pendidikan pengembangan di universitas dalam negeri dan luar negeri. (Supandi, 2018) Selain itu, TNI AL memiliki program penguatan keterampilan personel dalam bidang bahasa, berdasarkan pada motto TNI AL yakni “*Join the Navy to See the World*” yang mengacu pada tugas TNI AL yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan diplomasi, sehingga setiap personel dituntut untuk mampu menguasai bahasa Inggris. Berdasarkan hal tersebut, TNI AL membentuk program khusus Kursus Intensif Bahasa Inggris (KIBI) bagi personelnnya. (Kusuma, Hasra, & Anindhita, 2021)

Kedua, unggul teknologi (*excellent technology*), untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi wilayah strategis, TNI AL melakukan program modernisasi alutsista dan non-alutsista serta pengembangan fasilitas sarana prasarana pertahanan negara pada matra laut. Program tersebut memfokuskan pada peningkatan kemampuan operasional TNI AL, sebagai upaya untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan Indonesia seperti ALKI II sebagai jalur pelayaran internasional. TNI AL melakukan pengembangan kekuatan alutsista yang digelar diseluruh pangkalan TNI AL di Indonesia, sedangkan pada sarana dan prasarana, TNI AL melakukan pembangunan pangkalan-pangkalan pada posisi yang strategis untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi pemberdayaan wilayah laut serta perbaikan dan perawatan alutsista. (Supandi, 2018)

Ketiga, unggul organisasi (*excellent organization*), organisasi merupakan pondasi yang menjadi dasar angkatan laut dalam merespon tantangan operasional pengamanan wilayah maritim Indonesia. Sehingga, TNI AL berupaya untuk meningkatkan interoperability diantara kekuatan TNI serta penguatan dalam pertukaran informasi dengan instansi yang memiliki kepentingan dibidang kemaritiman nasional. TNI AL mendorong terbentuknya organisasi yang mengelola sistem pengawasan lingkungan laut dan komunikasi antar organisasi yang terpadu, selain itu juga mendorong pengembangan strategi operasional terpadu antar aparat keamanan maritim agar lebih efisien dan efektif. Hal ini diwujudkan melalui berkerjasama dengan lembaga penegak hukum di laut seperti Polairud, KKP, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Bakamla. (Supandi, 2018)

Keempat, unggul kemampuan operasional (*excellent operational capability*), operasi merupakan output kinerja angkatan laut yang dilakukan oleh satuan-satuan operasi. Angkatan laut berstandar internasional selalu didukung dengan personel yang tangguh, kesiapan alutsista, logistik yang memadai, intelegen yang akurat, dan kemampuan komando serta kendali yang handal jika dihadapkan pada luasnya spectrum operasi militer. Melalui program dukungan kesiapan matra laut, TNI AL diarahkan dapat meningkatkan kesiapan unsur untuk dikerahkan dalam menjalankan tugas, untuk menjadi organisasi yang unggul diwujudkan dengan meningkatkan anggaran operasional serta anggaran untuk perawatan dan perbaikan alutsista dan berbagai peralatan dalam pelaksanaan operasi. (Supandi, 2018)

Maka, untuk dapat mencapai gagasan *world class navy*, TNI AL harus unggul dalam 4 aspek tersebut, keunggulan tersebut menjadi parameter dalam mencapai *world class navy*. Gagasan *world class navy* ini dapat didukung dengan *sea power* yang dimiliki Indonesia, jika ditinjau berdasarkan pada enam elemen *sea power* yang dimiliki yang mencakup letak geografis, sifat fisik, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter bangsa, dan karakter

pemerintahan (Germond, 2015) yang cukup mumpuni, sehingga TNI AL dapat memanfaatkan keunggulan tersebut sebagai alat untuk dapat mencapai *world class navy*.

Maka dengan hadirnya gagasan *world class navy*, TNI AL memprioritaskan pemenuhan kebutuhan alat pertahanan untuk dapat mencapai gagasan tersebut, sehingga hal ini dapat mendukung dalam pengamanan ALKI II karena kebutuhan alat keamanan dan pertahanan dapat terpenuhi. (Kapten Laut (P) Taufik Yudha Laksana, 2023) Berdasarkan pada hal tersebut, dalam kaitannya dengan sarana atau sumber daya (*Means*) dalam konsep strategi menurut Lykke, selain *sea power* yang dimiliki Indonesia, gagasan *world class navy* juga menjadi sumber daya yang digunakan dalam menjalankan operasi (*Ways*) untuk mencapai tujuan (*Ends*), hal ini dapat dilihat dari MEF yang ingin dicapai untuk menjadi *world class navy* serta peningkatan dalam beberapa aspek sehingga memudahkan TNI AL dalam menjalankan operasi.

KESIMPULAN

Sebagai tanggung jawabnya sebagai negara kepulauan, Indonesia menetapkan 3 alur laut kepulauan berupa ALKI sebagai jalur pelayaran internasional. Posisi ALKI yang bebas dilalui oleh kapal dari negara manapun menjadikan jalur ini rawan terhadap berbagai macam ancaman, sehingga TNI AL sebagai lembaga pengamanan di laut bertugas untuk menjaga wilayah krusial seperti ALKI khususnya ALKI II. Maka dalam menjalankan tugas tersebut, TNI AL memiliki empat peran utama yakni peran militer, peran penegakan hukum di laut, peran diplomasi, dan peran dukungan. Selain itu kaitannya dengan strategi pengamanan ALKI II, pola pelaksanaan strategi TNI AL dirumuskan berdasarkan konsep strategi yang terdiri dari 3 aspek yakni pertama, tujuan (*Ends*) untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara. Kedua, cara (*Ways*) untuk merealisasikan peran utama TNI AL melalui tiga strategi generik utama berupa strategi pertahanan berlapis, strategi penangkalan, dan strategi pengendalian laut. Strategi tersebut dilaksanakan melalui operasi berdasarkan pada kondisi lingkungan strategis yakni (1) operasi kerjasama dengan atase pertahanan negara kapal, (2) operasi pengamanan ALKI II bersifat semesta, (3) operasi pengamanan ALKI II bersifat defensif aktif, (4) operasi pengamanan *Traffic Separation Scheme*, dan (5) sinergitas antar *stakeholder*.

Adapun aspek ketiga konsep strategi yakni sarana (*Means*) dalam pengamanan ALKI II memanfaatkan *sea power* yang dimiliki serta gagasan *world class navy* sebagai pendukung bagi TNI AL dalam menjalankan operasi, karena dalam gagasan tersebut terdapat standarisasi yang harus terpenuhi berupa pembangunan kekuatan TNI AL secara bertahap melalui program pembangunan *Minimum Essential Force* (MEF) yang harus dicapai hingga tahun 2024 yakni 151 KRI, 54 pesawat udara, serta 333 kendaraan taktis dan jumlah batalyon yang perlu ditambahkan serta unggul pada beberapa aspek yakni unggul sumber daya manusia, unggul teknologi, unggul organisasi dan unggul kemampuan operasional.

Strategi dan operasi yang dijalankan TNI AL cukup efisien dalam menjaga keamanan maritim, terdapat perubahan yang cukup signifikan berupa menurunnya tingkat ancaman di Laut Sulu dari ancaman “berpotensi tinggi” menjadi “sedang”, selain itu data menunjukkan bahwa terdapat penurunan tingkat kecelakaan laut, TOC dan IUUF pada 2023. Hal ini menandakan bahwa meskipun ancaman masih tetap ada, namun tingkat ancaman dapat dikurangi melalui OMSP yang dijalankan oleh TNI AL.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, I. S. (2023). *Pengamat: Filipina Termasuk Pemasok Utama Senpi yang Dipakai KKB di Papua*. Retrieved April 2023, 2023, from Kompas.com: <https://amp.kompas.com/global/read/2023/01/13/122800070/pengamat--filipina-termasuk-pemasok-utama-senpi-yang-dipakai-kkb-di-papua>.
- Alamsyah, H. K., Ariadno, M. K., Arsegianto, & Simanjuntak, S. W. (2022). Strategi Pengelolaan Lingkungan Laut Terhadap Aktivitas Hak Lintas Alur Kepulauan (ALKI) di Perairan Selat Lombok (Marine Environmental Management Strategies On The Activities Of Indonesia Archipelagic Sea Lane (IASL) In The Lombok Strait Waters). *Jurnal Perikanan dan Kelautan* , 12 (1), 45-54. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jpk/article/download/14853/9336>
- Alipour, A. (2021). Presenting the Theory of Maritime Civilization, A Criticism of the Sea Power Theory. *International Journal of Maritime Policy* , 1 (1). <https://www.sid.ir/paper/974947/en>.
- Ansori, Ikhsanudin, A. H., & Suhardono, E. (2017). Sinergi Bakamla dengan TNI AL Guna Penanggulangan Tindak Pidana di Laut dalam Rangka Penegakan Hukum. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut* , 3 (3), 47-68. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPL/article/view/139>.
- Anwar, S. (2018). Membangun Keamanan Maritim Indonesia dalam Analisa Kepentingan, Ancaman, dan Kekuatan Laut. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* , 6 (3), 69-90. 6, no. 3 (2018): 69–90. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i3.315>.
- Azizah, R. Z. (2021). Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa. *Jurnal Diplomasi Pertahanan* , 6 (3), 94-104. <https://doi.org/10.33172/jdp.v6i3.666>.
- Bueger, C. (2015). What Is Maritime Security? *Marine Policy* , 53, 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>.
- Bunga, G. A. (2017). Pelanggaran Kedaulatan Indonesia Oleh Pesawat F-18 Hornet Milik Amerika Serikat (Ditinjau dari Konvensi Chicago Tahun 1944 dan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982). *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* , 8 (2), 62. <https://doi.org/10.28932/di.v8i2.724>.
- Cipto, H. (2022). *Polisi Selidiki Seaglider yang Ditemukan Nelayan di Kepulauan Selayar*. Retrieved April 15, 2023, from Kompas.com: <https://makassar.kompas.com/read/2022/02/19/071110778/polisi-selidiki-seaglider-yang-ditemukan-nelayan-di-kepulauan-selayar?page=all>.
- Cipto, H. (2022). *Polda Sulsel Bongkar Kasus Perdagangan Orang ke Malaysia, Modusnya Dipekerjakan ke Perkebunan Sawit*. Retrieved April 20, 2023, from Kompas.com: <https://makassar.kompas.com/read/2022/12/08/145656978/polda-sulsel-bongkar-kasus-perdagangan-orang-ke-malaysia-modusnya>.
- Dalimunthe, A. A., Suwito, & Asmoro, N. (2023). Strategi Membangun Ekosistem Pemeliharaan Alat Utama Sistem Senjata Nasional dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* , 6 (6), 4192-95. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i6.1777>.
- Darmawan, R. (2022). *3 Laut Paling Dalam di Indonesia*. Retrieved Mei 17, 2023, from SINDONEWS.com: <https://sains.sindonews.com/read/764881/766/3-laut-paling-dalam-di-indonesia-1652108721>.
- Deny, S. (2014). *Perkuat Maritim, RI Bangun 5 Pelabuhan Laut Dalam*. Retrieved Januari 15, 2023, from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2144860/perkuat-maritim-ri-bangun-5-pelabuhan-laut-dalam>.
- Dikominfo Provinsi Kalimantan Utara. (2021). *Sekda Harapkan Sinergitas Kebijakan Untuk Pemberantasan TPPO di Kaltara*. Retrieved April 20, 2023, from Dinas Komunikasi,

- Informatika, Statistik dan Persandian: <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/sekda-harapkan-sinergitas-kebijakan-untuk-pemberantasan-tppo-di-kaltara/>.
- Dimas, C. (2021). *Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Ditangkap di Laut Sulawesi dan Selat Malaka*. Retrieved April 20, 2023, from KompasTV: <https://www.kompas.tv/article/183096/kapal-asing-pelaku-illegal-fishing-ditangkap-di-laut-sulawesi-dan-selat-malaka>.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2018). *Indonesia Ajukan Penetapan Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Lombok dan Selat Sunda Ke IMO*. Retrieved Januari 2023, 2023, from Kementerian Perhubungan Republik Indonesia: <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/5478/indonesia-ajukan-penetapan->.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2019, Juni 10). *Pentingnya Bagan Pemisah Alur Laut di Selat Sunda dan Selat Lombok Bagi Indonesia*. Retrieved Desember 12, 2022, from Kementerian Perhubungan Republik Indonesia: <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/5132/pentingnya-bagan-pemisahan->.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2015). *Ratifikasi Konvensi BWM, Komitmen Indonesia Lindungi Lingkungan Laut*. Retrieved Maret 23, 2023, from Kementerian Perhubungan Republik Indonesia: <https://dephub.go.id/post/read/ratifikasi-konvensi-bwm,-komitmen-indonesia-lindungi-lingkungan-laut>.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2019, Juni 10). *Sah! Bagan Pemisah Alur Laut di Selat Sunda dan Selat Lombok Berlaku Juni 2020*. Retrieved Mei 13, 2023, from Kementerian Perhubungan Republik Indonesia: <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/4522/sah-bagan-pemisahan-alur-laut-di-selat-sunda-dan-selat-lombok-berlaku-juni-2020>.
- Dirgantara, O. B., Eko W., T., & Suharto, D. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Operasi Trilateral Maritime Patrol Indomalphi dalam Menjaga Keamanan Maritim di Wilayah Laut Sulu. *Jurnal Maritim Indonesia*, 8 (1), 14-23. <https://doi.org/10.52307/ijm.v8i1.48>.
- Dispen Komando Armada II. (2018). *Struktur Organisasi Koarmada II*. Retrieved Maret 1, 2023, from Koarmada II: <https://koarmada2.tnial.mil.id/>.
- DPR. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia*. Indonesia: hukumonline.com. https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_4760.PDF.
- Fitriyanti, R. (2020). Implikasi Kebijakan Jalur Sutra Maritim Cina Terhadap Kekuatan Poros Maritim Dunia Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 1 (2). <https://doi.org/10.15408/jisi.v0i0.19033>.
- Gard. (2023, February 23). *Piracy Trends and High Risk Areas*. Retrieved July 9, 2023, from Gard: https://www-gard-no.translate.google.com/web/articles?documentId=34977995&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.
- Germond, B. (2015). *The Maritime Dimension of European Security*. United States : Palgrave Macmillan.
- Hadyanti, A. M., Prakoso, L. Y., & Rudiawan, B. (2021). Pentingnya Satelit Untuk Mendukung Strategi Pertahanan Laut Indonesia Khususnya di Wilayah Chokepoint the Importance of Satellites To Support Indonesia's Marine Defense Strategies Especially the Chokepoints. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 7 (3), 195-202. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPL/article/view/859/766>.
- Hakim, R. N. (2021). *Temuan 'Drone' di Laut Indonesia dan Terancamnya Keamanan Nasional*. Retrieved April 15, 2023, from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/04/11500251/temuan-drone-di-laut-indonesia-dan-terancamnya-keamanan-nasional>
- Harianto, M., & Wahyudono, H. (2023, Januari 14). *Koarmada II Jamin Keamanan Laut Perairan Indonesia Tengah*. Retrieved Maret 18, 2023, from Antara Sultra:

- <https://sultra.antaranews.com/berita/438123/koarmada-ii-jamin-keamanan-laut-perairan-indonesia-tengah>
- Harris, A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia II. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 5 (1), 15-30. <https://doi.org/10.33172/spl.v5i1.648>.
- Humas BNN. (2021). *Kolaborasi War On Drugs, BNN Gandeng Stakeholder Gelar Operasi Laut Interdiksi Terpadu*. Retrieved April 20, 2023, from Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: <https://bnn.go.id/kolaborasi-war-drugs-bnn-gandeng-stakeholder-gelar-operasi/>.
- Humas Prov. Kaltim. (2013). *Manfaatkan Posisi Geografis ALKI II*. Retrieved Januari 12, 2023, from Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur: <https://www.kaltimprov.go.id/berita/manfaatkan-posisi-geografis-alki-ii>.
- Indonesia Coast Guard. (2023). *Diagram Kerentanan Maritim*. Retrieved April 23, 2023, from Indonesia Maritime Information Centre: <https://imic.bakamla.go.id/>.
- Isman, A. N. (2022). *Ini Fungsi Side Scan Sonar 'Made In USA' yang Ditemukan di Laut Selayar*. Retrieved April 15, 2023, from Detik.com: <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-5949526/ini-fungsi-side-scan-sonar-made-in-usa-yang-ditemukan-di-laut-selayar>.
- Kapten Laut (P) Taufik Yudha Laksana, S. (2023, Maret 13). Strategi TNI AL dalam Pengamanan Wilayah ALKI II. (B. N. Agustina, Interviewer) Mataram, NTB, Indonesia.
- Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Kementerian Pertahanan RI. (2014). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Kharish, L., Syahtaria, I., Sianturi, D., Prakoso, L. Y., Saragih, H. J., & Bangun, E. (2022). Strategi Gelar Kekuatan TNI Angkatan Laut dalam Mengatasi Pelanggaran di Wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia II Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Perairan dalam Rangka Mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2 (8), 2849-58. <https://doi.org/10.33172/spl.v5i1.648>.
- Koarmada II. (2018). *Tugas Pokok*. Retrieved Maret 15, 2023, from Dispen Komando Armada II: <https://koarmada2.tnial.mil.id/>.
- Kusnandar, V. B. (2022). *Era Bonus Demografi, 69% Penduduk Indonesia Masuk Kategori Usia Produktif Pada Juni 2022*. Retrieved Januari 9, 2023, from Databooks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/30/era-bonus-demografi-69-penduduk-indonesia-masuk-kategori-usia-produktif-pada-juni-2022#:~:text=>
- Kusuma, A. W., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Relevansi Strategi Pertahanan Laut Berdasarkan Doktrin Jalesveva Jayamahe Terhadap Globalisasi dan Perkembangan Lingkungan Strategis. *Strategi Pertahanan Laut*, 6 (1), 77-100. <https://doi.org/10.33172/spl.v6i1.635>.
- Kusuma, D. L., Hasra, H., & Anindhita, W. (2021). Penguatan Keterampilan Berbahasa Prajurit TNI AL di KRI Sutanto-377 Melalui Modul Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Mewujudkan TNI AL Berkelas Dunia (World Class Navy). *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, Dan Seni*, 1, 168-71. https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/prosiding_fbs/article/view/24004/11640.
- Listiyono, Y., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk Mewujudkan Keamanan Maritim dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia. *Strategi Pertahanan Laut*, 5 (3). <https://doi.org/10.33172/spl.v5i3.642>
- Lykke Jr, A. F. (1997). Defining Military Strategy. *Military Review*, 38, 183-86. <https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/English/75th-Anniversary/75th-PDF/75th-Lykke.pdf>.

- Mega, A. P. (2021). *KKP Tertibkan Kapal Indonesia yang Melanggar di Selat Makassar*. Retrieved April 23, 2023, from Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia: <https://kkp.go.id/artikel/31452-kkp-tertibkan-kapal-indonesia-yang-melanggar-di-selat-makassar>.
- Noviani, A. (2023, Desember 27). *Illegal Fishing di Laut Arafura: Indonesia Rugi Rp40 Triliun/Tahun*. Retrieved Desember 24, 2022, from Bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20131227/99/194512/illegal-fishing-di-laut-arafura-indonesia-rugi-rp40-triliuntahun->
- Nugroho, A. Y., Susilo, E., & Saputra, R. (2022). Analisis Pembelajaran Pertempuran Laut Antara Inggris Dengan Jerman di Laut Atlantik Utara 1941 Bagi TNI AL. *Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* , 9 (2), 160-65. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i1.2022.160-165>.
- Pemerintah Pusat. (2002). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 37 Tahun 2002 (37/2002) Tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan*". Jakarta: 8 Spill Science and Technology Bulletin. <https://doi.org/10.1155/2013/704806>.
- Prasetyo, K. A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Kuncoro Ary Prasetyo, Lukman Yudho Prakoso, and Dohar Sianturi, "Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Keamanan Maritim. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut* , 5 (1), 30-50. <https://doi.org/10.33172/spl.v5i1.649>.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta.
- Purnomo, I. J., & Hariyanto, S. (2022). Peran Kapal Layar Latih Kri Bima Suci dalam Mengembangkan Budaya Maritim. *Jurnal Manajemen Dirgantara* , 15 (1), 29-38. <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v15i1>
- Putra A, I. N., & Pramono, S. H. (2017). Konsepsi Pembangunan Kekuatan dan Kemampuan Sistem Informasi Operasi TNI AL dalam Mendukung Penyelenggaraan Strategi Pertahanan Laut Nusantara. *Jurnal ASTRO* , 7, 1-48. <https://asrojournal-sttal.ac.id/index.php/ASRO/article/view/35>.
- Rachmanto, A. S. (2009). Pola Penyelundupan dan Peredaran Senjata Api Ilegal di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia* , V (II), 31-46. <https://media.neliti.com/media/publications/4259-EN-pola-penyelundupan-dan-peredaran-senjata-api-ilegal-di-indonesia.pdf>.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. Malang.
- Rahman, C. (2009). Concepts of Maritime Security: A Strategic Perspective on Alternative Visions for Good Order and Security at Sea, with Policy Implications for New Zealand. *University of Wollongong* , 85, 67.
- Ramadhan, B., & Widodo, R. I. (2016). *Penyelundupan Senjata Api ke Poso Diduga Kuat Lewat Jalur Laut*. Retrieved April 20, 2023, from Republika.com: <https://news.republika.co.id/berita/oapqo5330/penyelundupan-senjata-api-ke-poso-diduga-kuat-lewat-jalur-laut>.
- Rania, C. (2022). *Ancaman Non Tradisional yang Perlu Diwaspadai Oleh Bangsa Indonesia*. Retrieved July 2, 2023, from Ruangguru: https://roboguru.ruangguru.com/forum/ancaman-non-tradisional-yang-perlu-diwaspadai-oleh-bangsa-indonesia-kecuali-a-invasi_FRM-VCKPY4QX.
- Rezkisari, I. (2021). *Mengulik Temuan Drone Laut, Riset atau Spionase?* Retrieved April 15, 2023, from Republika.com: <https://news.republika.co.id/berita/qmg8vj328/mengulik-temuan-drone-laut-riset-atau-spionase>.

- Saraswati, A. L., & Pinatih, N. K. (2020). Strategi Keamanan Maritim Indonesia Terhadap Maritime Piracy Di Laut Sulu Tahun 2016. *Transformasi Global* , 7 (1), 114-43. <https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2020.007.01.6>.
- Simfoni PPA. (2022). *Jenis Kekerasan yang Dialami Korban*. Retrieved April 23, 2023, from Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia: <https://kekerasan.kemempna.go.id/ringkasan>.
- Sudini, L. P. (2011). *Pengelolaan Pencemaran Laut di Indonesia* . Surabaya: R.A.De.Rozarie.
- Supandi, A. (2018). Pembangunan Kekuatan TNI AL dalam Rangka Mendukung Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* , 5 (2), 1-24. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.355>.
- Supartono, Sugiharto, S., & Adriyanto, A. (2020). Peran Instansi Kemaritiman dalam Pencegahan Penyelundupan Narkoba di ALKI II (Studi Kasus di Selat Makassar Periode 2015-2019). *Jurnal Keamanan Maritim* , 6 (2), 161-81. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KM/article/view/1000%0A>
- Suratmin. (n.d.). *Skenario Ketahanan Nasional (Geostrategi Indonesia)*. Retrieved Januari 19, 2023, from <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:>
- Suryawan, I. G., Ladjide, S., & Riyadi, S. F. (2021). Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam Perwujudan Good Order At Sea: Studi Kasus Alur Laut Kepulauan Indonesia II. *Jurnal Selat* , 8 (2), 149-58. <https://doi.org/10.31629/selat.v8i2.3537>.
- Susdarwono, E. T. (2020). Analisis Pertimbangan Pemindahan Ibukota NKRI Ke Kalimantan Timur Berdasarkan Deskripsi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). *Jurnal Sosial Politik Peradaban* , 1 (2), 25-35. <https://journal.peradaban.ac.id/index.php/jspp/article/view/630>.
- Suwarsono, D. A. (2022). *KKP Hentikan Aksi Pengebom Ikan Asal Malaysia di Laut Sulawesi*. Retrieved April 23, 2023, from Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan: <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/40645-kkp-hentikan-aksi-engebom-ikan-asal-malaysia-di-laut-sulawesi>
- Tentara Nasional Indonesia. (2010). *Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tridarma Ekakarma (TRIDEK)*. Tentara Nasional Indonesia . Indonesia: Panglima TNI. <https://sejarah-tni.mil.id/wp-content/uploads/2017/03/PERPANG-TRIDEK.pdf>.
- Tim SINDONews. (2022). *Arti dan Sejarah Doktrin TNI AL Jalesveva Jayamahe*. Retrieved Maret 1, 2023, from SINDONEWS.com: <https://nasional.sindonews.com/read/905213/14/arti-dan-sejarah-doktrin-tni-al-jalesveva-jayamahe-1665040202>.
- Wiranto, S. (2020). Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia Melalui Kebijakan Kelautan Indonesia dengan Strategi Pertahanan Maritim Indonesia: Perspektif Pertahanan Maritim. *Jurnal Maritim Indonesia* , 8 (2), 110-26. <https://doi.org/10.52307/ijm.v8i2.35>.
- Yakti, P. D. (2017). TNI Angkatan Laut Sebagai World Class Navy pada Strategi Pertahanan Indonesia dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia. *Gema Keadilan Edisi Jurnal* , 4 (1). <https://doi.org/10.14710/gk.2017.3788>.
- Yarger, H. R. (2008). Toward a Theory of Strategy: Art Lykke and the U.S. Army War College Strategy Model. *Strategic Studies Institute* , 1. <http://www.jstor.com/stable/resrep12115.6>.
- Yuliarta, I. W., & Rahmat, H. K. (2021). Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Teknologi Sebagai Upaya Memperkuat Keamanan Maritim di Indonesia. *Dinamika Sosial Budaya* , 23 (1). <http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v23i1.3228>.
- Zulfiqor, A. (2020). *Malaysia 2 Kali Langgar Batas Wilayah di Nunukan, KSAL Kirim Nota Protes*. Retrieved Januari 7, 2023, from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2020/08/11/15561471/malaysia-2-kali-langgar-batas-wilayah-di-nunukan-ksal-kirim-nota-protos?page=all>.